



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAMBI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BAKTIAN NURMANTYO**
2. Jabatan : **KEPALA**
3. NHK : **924079**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.496.400.000**

1. Tanah Seluas 520 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.560.000.000
2. Tanah Seluas 774 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 387.000.000
3. Tanah Seluas 1 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 444.900.000
4. Tanah Seluas 587 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 293.500.000
5. Tanah Seluas 520 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 156.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 485.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **159.500.000**

1. MOTOR, HONDA SUPRA 125 BEBEK Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1,3 G TOYOTA NEW AVANZA 1,3 G Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **35.400.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	46.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.737.300.000
III. HUTANG	Rp.	9.160.962
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.728.139.038

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.